

**PENGARUH PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Akademik

Guna Mencapai Gelar Sarjana Sosial Pada

Pada Prodi Ilmu Pemerintahan



OLEH

**TESHA SEPTIAN LUKITO RANTE
NIM : 2015 10 132**

**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM DI TANAH PAPUA
CABANG KABUPATEN JAYAWIJAYA**

**UNIVERSITAS AMAL ILMIAH YAPIS WAMENA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL : **PENGARUH PEMANFAATAN SUMBER
DAYA ALAM TERHADAP PENDAPATAN
ASLI DAERAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA**

Diusulkan Oleh,

NAMA : **TESHA SEPTIAN LUKITO RANTE**
NIM : 2015 10 132
PROGRAM STUDI : ILMU PEMERINTAHAN
JURUSAN : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diperiksa dan di setujui
Pada tanggal :.....
Dan siap untuk diseminarkan

PEMBIMBING I,

PEMBIMBING II,

SITI KHIKMATUL RIZQI, S.IP, M.Si
NIDN. 1201037702

DEFRAN SISKA, S.E, MM
NIDN. 1204128501

Mengetahui :
Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

SITI KHIKMATUL RIZQI, S.IP, M.Si
NIDN. 1201037702

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, petunjuk, perlindungan serta pertolongannya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis menerima banyak bimbingan, petunjuk serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini secara khusus penulis dengan tulus menyampaikan banyak terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak **DR.H. Rudihartono Ismail, M.Pd** selaku Rektor Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengenyam pendidikan tinggi.
2. Bapak **SITI KHIKMATUL RIZQI, S.IP, M.Si** selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis.
3. Ibu **SITI KHIKMATUL RIZQI, S.IP, M.Si** selaku Pembimbing I dan Ibu **Defran Siska, S.E., M.Si** selaku Pembimbing II yang senantiasa membantu dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini dari awal hingga selesai.
4. Bapak **Siti Khikmatul rizqi, S.IP., M.Si** selaku dosen wali yang banyak membantu dan mendorong penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, khususnya pada Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah mendidik, membina dan mengabdikan ilmu kepada penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis selama menekuni studi, serta pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah **Samuel Patasik, S.Pi** yang telah memberikan ijin, rekomendasi bantuan kepada penulis serta seluruh pegawai pada dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
6. Orangtuaku tercinta, Ayahanda **aniel Rante, S.Sos, M.Si** dan Ibunda **Etik Ernawati** dan yang telah membesarkan penulis serta adikku Dimas. B.P Rante yang

ABSTRAKSI

Tesha Septian Lukito Rante. 201510132_____” Pengaruh Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya” (Pembimbing: **Siti Khikmatul Rizqi dan Defran Siska**).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Sumber Daya Alam dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayawijaya. Penelitian ini terdiri dari 2 variabel, yaitu variabel sumber daya alam sebagai variabel bebas/*independent* dengan indikator yang diteliti adalah Sumber daya pertanian, sumber daya kehutanan dan sumber daya pariwisata, sedangkan variabel yang kedua adalah pendapatan asli daerah dengan indikator pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Dalam penarikan sampel penulis menggunakan metode Purposive sampling, Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 11 orang pejabat Daerah yang terdiri dari Pimpinan SKPD/OPD dan orang Kepala Bidang terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Untuk pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan jumlah skor total masing-masing variabel dengan menggunakan korelasi *pearson product moment*, sedangkan pengujian reliabilitas instrument penelitian metode *cronbach alpha* dengan aplikasi SPSS 21 *for Windows* Dan instrument penelitian ini memiliki tingkat valid dan reliabel.

Dari hasil uji korelasi menggunakan SPSS 21. *for Windows* antara kedua variabel yaitu sumber daya alam dengan pendapatan asli daerah diperoleh nilai $r = 0,566$, yang berarti hubungan antara keduanya sedang. Dari hasil uji signifikansi diperoleh nilai t sebesar 3,568, selanjutnya nilai tersebut dibandingkan dengan harga t tabel untuk kesalahan 5% uji dua pihak dan dk

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang semakin pesat menyebabkan pemanfaatan sumber daya alam ikut meningkat pula. Seperti yang kita tahu, sumber daya alam dapat di klasifikan sumber daya alam terbarukan dan sumber daya alam tidak terbarukan. Kenyataannya, pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat masih mengalami banyak kendala seperti kegiatan pertambangan menyebabkan degradasi lingkungan. Sebagai anggota masyarakat perlu meningkatkan kepedulian kepada lingkungan untuk mengelola dan melestarikan lingkungan alam. Pemanfaatan sumber daya berkelanjutan dapat di kembangkan dalam kegiatan pertanian , pertambangan , industri , dan pariwisata.

Sebagai salah satu negara yang luas di dunia, Indonesia tidak hanya memiliki wilayah daratan dan perairan yang luas tetapi juga kaya dengan sumber daya alam. Hutan tropis yang luas diperkirakan mencapai 144 juta hektar sangat kaya dengan ribuan jenis burung, ratusan jenis mamalia dan puluhan ribu jenis tumbuhan. Perairan yang luas tempat bagi perkembangan populasi ikan dan hasil perairan lainnya. Demikian Pula dengan buminya yang mengandung deposit berbagai jenis mineral dalam jumlah yang tidak sedikit.

Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) merupakan suatu hal yang sangat penting dibicarakan dan dikaji dalam kerangka pelaksanaan pembangunan nasional kita. dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah sesungguhnya kita dapat melaksanakan proses pembangunan bangsa ini secara berkelanjutan tanpa harus dibayangi rasa cemas dan takut akan kekurangan modal bagi pelaksanaan pembangunan tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Sumber Daya Alam

Sumber daya adalah sesuatu yang memiliki nilai guna. Sumber Daya Alam adalah keseluruhan faktor fisik, kimia, biologi dan sosial yang membentuk lingkungan sekitar kita. Sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita. Sumber daya alam bisa terdapat di mana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya. Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia **Abdullah, (2007:3)**. Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia.

Pembangunan suatu bangsa memerlukan aset yang sangat penting yang disebut Sumber Daya (*resources*), sumber daya alam (*natural resrces*), maupun sumber manusia. Numun dari kedua aset tersebut yang lebih penting adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah kekuatan yang bersumber dari diri manusia yang mempunyai kemampuan untuk membangun dalam arti untuk maju positif.

Menurut **Sedarmayanti (2001:27)** Sumber daya manusia adalah tenaga kerja atau pegawai didalam suatu orgnisasi yang mempunyai peran penting dalam mencapai keberhasilan

Menurut **Hadari Nawawi (1994:40)** berpendapat bahwa Sumber Daya Manusia adalah :

- a) Manusia yang bekerja dilingkungan suatu organisasi (personil, tenaga kerja, pekerja atau karyawan).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan pada instansi-instansi Pemerintah yang berkompeten terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam di Kabupaten Jayawijaya dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian \pm 2 Bulan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah Deskriptif yaitu suatu penelitian yang memusatkan pada pemecahan masalah aktual tentang bagaimana pendapat para pejabat daerah tentang pemanfaatan Sumber Daya Alam dan bagaimana dampaknya terhadap pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Pada awalnya data dikumpulkan, disusun dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang sebenarnya.

Penelitian ini juga merupakan penelitian Asosiatif karena bertujuan mengetahui hubungan antara pengaruh pemanfaatan Sumber Daya Alam terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Sugiyono (2003:11) .Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variable atau lebih.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Dalam penelitian ini, populasi sasaran (target) dalam hal ini adalah para pejabat c 41 yang berkompeten terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan pendapatan asli daerah di Kabupaten Jayawijaya.

2. Sampel

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah Purposive sampling. Purposive sampling adalah salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan purposive sampling tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan teknik sampling tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah 11 orang pejabat Daerah yang terdiri dari Pimpinan SKPD/OPD dan orang Kepala Bidang terkait pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Jayawijaya. Secara terperinci Sampel penelitian dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel. 3.1 Daftar Sampel Peneitian Pengaruh Pemanfaatan SDA terhadap PAD di Kabupaten Jayawijaya, Tahun 2019.

| SKPPD | SAMPEL | JUMLAH |
|-------|--------------|--------|
| SETDA | 1. Asisten 2 | 1 |

| | | |
|-----------|-----------------------------|----|
| | 2. Staf Ahli Ekonomi | 1 |
| BAPEDDA | 1. Kepala Bapedda | 1 |
| | 2. Kabid. Sosial dan Budaya | 1 |
| DPPKAD | 1. Kepala Dinas PPKAD | 1 |
| | 2. Kabid. PAD | 1 |
| PERTANIAN | 1. Kepala Dinas Pertanian | 1 |
| | 2. 4 Kabid | 4 |
| TOTAL | | 11 |

D. Instrumen Penelitian

Menurut **Sugiyono (2009:90)** instrumen penelitian yang digunakan adalah daftar kuesioner yang bersesuaian dengan variabel yang akan diteliti. Kuesioner bersifat tertutup yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan terlebih dahulu. Skala penilaian untuk butir pertanyaan disusun berdasarkan Skala *Likert* lima interval yaitu 1 sampai 5 yang dikategorikan sebagai berikut:

- a. Jika responden menjawab Sangat Baik, maka diberi nilai (5)
- b. Jika responden menjawab Baik, maka diberi nilai (4)
- c. Jika responden menjawab Cukup Baik, maka diberi nilai (3)
- d. Jika responden menjawab Kurang Baik, maka diberi nilai (2)
- e. Jika responden menjawab Sangat Tidak Baik, diberi nilai (1)

Instrumen sebelum digunakan sebagai alat penelitian harus diuji terlebih dahulu validitas dan reliabilitasnya, sehingga dapat diketahui apakah instrumen dapat digunakan sebagai alat pengumpul data yang akurat.

1. Pengujian Validitas Instrumen

Menurut **Sugiyono (2009:90)** pengujian validitas instrumen menggunakan SPSS.statistic 22, dimaksud untuk mengetahui kepastian tingkat kesahhan dari pertanyaan yang digunakan dalam mengumpulkan data. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur

Untuk pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, dengan mengkorelasikan skor tiap butir dengan jumlah skor total dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment*. Biasanya instrument dianggap valid apabila memenuhi syarat minimum $r = 0,30$. Kalau korelasi antara butir instrument dengan skor total kurang atau r kurang dari $0,30$, maka butir dalam instrument tersebut dinyatakan tidak valid (**Sugiyono 2009:90**).

Dengan demikian maka untuk menguji validitas tiap butir dalam penelitian ini menggunakan analisis item dengan menggunakan korelasi *Pearson Product Moment* sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien Korelasi antara variabel X dan Y

n = Banyaknya sampel

$\sum X$ = Jumlah skor X

$\sum Y$ = Jumlah skor Y

$\sum XY$ = Jumlah dari hasil kali skor X dan Y yang dipasangkan

$\sum X^2$ = Jumlah skor X yang dikuadratkan

$\sum Y^2$ = Jumlah skor Y yang dikuadratkan

Untuk menentukan item valid atau tidak, hasil *r hitung* dibandingkan dengan *r tabel*, jika harga *r hitung* lebih besar dari *r tabel*, item tersebut dinyatakan valid.

2. Uji Reliabilitas

Menurut **Sugiyono, (2009:90)** uji reliabilitas digunakan untuk menguji keajegan pengukuran suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan reliabel jika instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama sedangkan **Nurgiantoro, (2000:310)** Uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan formula *Alpha Cornbach* dengan rumus sebagai berikut :

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1} \right] \left[1 - \frac{\sum S_i^2}{S_t^2} \right]$$

Keterangan:

K = jumlah item

$\sum S_i^2$ = Jumlah Varians Skor total

S_t^2 = Varians responden untuk item ke item

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut **Sugiyono, (2009:90)** teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepustakaan (*Library Reseach*)

Menurut **Sugiyono (2009:90)** yaitu mempelajari dan menganalisa buku atau bahan tulisan yang ada hubungannya dengan penelitian.

2. Pengamatan (*Observation*)

Menurut **Sugiyono (2009:90)** pengamatan secara langsung pada obyek penelitian untuk memahami situasi dan kondisi yang berkembang guna meningkatkan kesiapan lainya dalam pelaksanaan kajian.

3. Lapangan (*Field*)

Menurut **Sugiyono (2009:90)** yaitu pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara langsung mengunjungi lokasi penelitian yaitu badan pengelolaan keuangan dan asset daerah kabupaten jayawijaya melalui:

- a. Pengamatan (*Obeservation*) yaitu pengumpulan data dan informasi dengan mengadakan pengamatan langsung di lokasi penelitian.
- b. Kuesioner (*angket*) cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis dalam bentuk pilihan ganda dengan menggunakan skala likert kepada responden untuk dianalisa datanya.

F. Teknik Analisa Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

Menurut **Sugiyono (2006:137)** Deskripsi Variabel penelitian digunakan untuk menjelaskan secara garis besar mengenai variabel yang diteliti yaitu sumber daya alam dan pendapatan asli daerah. Langkah-langkah dalam deskripsi variabel adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun tabulasi data hasil penelitian

Tanggapan responden terhadap pertanyaan dalam kuesioner disusun dalam bentuk skor sesuai dengan kategori yang telah ditentukan.

b. Menghitung distribusi frekuensi

Dari tabulasi data yang telah disusun dihitung frekuensi skor jawaban responden untuk mengetahui tanggapan responden secara keseluruhan terhadap pertanyaan yang diajukan.

2. Uji Kolerasi

Menurut **Sugiyono (2009:75)** analisa data dalam penelitian ini menggunakan uji korelasi *Pearson Product Moment*. Korelasi *Pearson Product Moment* digunakan untuk menganalisa hubungan sumber daya alam sebagai variabel X dan pendapatan asli daerah sebagai variabel Y. Adapun rumusannya yaitu sebagai berikut:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan:

r_{xy} = Koefisien korelasi antara variabel X dan Y

n = Banyaknya sampel

$\sum X$ = Jumlah skor X

$\sum Y$ = Jumlah skor Y

$\sum XY$ = Jumlah dari hasil kali skor X dan Y yang dipasangkan

$\sum X^2$ = Jumlah skor X yang dikuadratkan

$\sum Y^2$ = Jumlah skor Y yang dikuadratkan

Dalam penelitian ini digunakan $\alpha = 0.05$, artinya kesalahan dari analisis sebesar 5%. Dengan kata lain, tingkat kepercayaan dari estimasi terhadap populasi adalah 95%. Setelah diketahui hasil uji statistik, maka dapat dibuat keputusan secara statistik ditandai dengan penerimaan dan penolakan terhadap hipotesis. Selain analisis secara statistik, juga digunakan metode deskriptif untuk memberikan penjelasan (*interpretasi*) terhadap keputusan yang dibuat.

Untuk menguji signifikan hubungan, yaitu apakah hubungan kedua variabel itu berlaku untuk seluruh populasi, maka perlu diuji signifikansinya. Rumus signifikannya adalah sebagai berikut:

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t =signifikansi

r = Korelasi *Pearson Product Moment*

n = Sampel

Rumus t hitung digunakan uji signifikansi, dimana apabila t hitung $> t$ tabel, maka H_a diterima dan H_0 ditolak, begitupun sebaliknya apabila t hitung $< t$ tabel maka H_a ditolak dan H_0 diterima.

1. Analisis Regresi Linier Sederhana

Menurut Sugiyono, (2003:237) Regresi linier sederhana

didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independent dengan satu variabel dependent. Pada penelitian ini regresi linier sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh pemamfaatan sumber daya alam terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten jayawijaya.

rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

A = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)

b = Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependent yang didasarkan pada variabel independent. Bila b (+) maka naik dan bila b (-) maka terjadi penurunan.

X = Sumber Daya Alam

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Keadaan Lokasi Penelitian

1) Sejarah Kabupaten Jayawijaya

Bila dirunut ke belakang, Kabupaten Jayawijaya mempunyai sejarah yang unik dan panjang. Tak dapat disangkal bahwa sejarah Kabupaten Jayawijaya berkaitan erat dengan sejarah perkembangan Gereja di wilayah ini. Dulu - seperti halnya daerah lain di Papua pada umumnya - daerah Lembah Baliem merupakan daerah yang terisolasi dari dunia luar. Tetapi sejak tahun 1950-an para misionaris dari luar negeri mulai berdatangan dan melakukan penginjilan di daerah ini. Lembah Baliem ditemukan secara tidak sengaja, ketika Richard Archbold, ketua tim ekspedisi yang disponsori oleh American Museum of Natural History melihat adanya lembah hijau luas dari kaca jendela pesawat yang mereka tumpangi pada tanggal 23 Juni 1938. Penglihatan tidak sengaja ini adalah awal dari terbukanya isolasi Lembah Baliem dari dunia luar. Tim ekspedisi yang sama di bawah pimpinan Kapten Teerink dan Letnan Van Areken mendarat di Danau Habema. Dari sana mereka berjalan menuju arah Lembah Baliem melalui Lembah Ibele dan mendirikan basecamp di Lembah Baliem. Pada tanggal 20 April 1954, sejumlah misionaris dari Amerika Serikat, termasuk di dalamnya Dr. Myron Bromley, tiba di Lembah Baliem. Tim misionaris ini menggunakan pesawat kecil yang mendarat di Sungai Baliem, tepatnya di Desa Minimo dengan tujuan utama untuk memperkenalkan agama Nasrani kepada Suku Dani di Lembah Baliem. Stasiun Misionaris Pertama didirikan di Hitigima. Selama 7 (tujuh) bulan mereka mendirikan landasan pesawat terbang pertama. Beberapa waktu kemudian misionaris menemukan sebuah areal yang ideal untuk dijadikan landasan pendaratan pesawat udara. Areal landasan pesawat terbang itu terletak

berbatasan dengan daerah Suku Mukoko dan di areal inilah mulai dibangun landasan terbang yang kemudian berkembang menjadi landasan terbang Wamena sekarang ini. Pada tahun 1958 Pemerintah Belanda mulai kekuasaannya di Lembah Baliem, dengan mendirikan pos pemerintahannya di sekitar areal landasan terbang, namun kehadiran Belanda di Lembah Baliem tidak lama, karena melalui proses panjang diawali dengan ditandatangani dokumen Pepera pada tahun 1969, Irian Barat kembali ke Pemerintah Republik Indonesia, sehingga Pemerintah Belanda segera meninggalkan Irian Barat (Papua).

2) Menjadi Daerah Otonom

Setelah Irian Barat kembali ke pangkuan Republik Indonesia, dilakukanlah penataan di seluruh Irian Barat, termasuk daerah-daerah otonom dengan sebutan “tingkat II”. Jayawijaya pun termasuk salah satu daerah dengan status tingkat II itu. Secara yuridis, kabupaten Jayawijaya dibentuk undang-undang nomor 12 tahun 1969 tentang pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2007). Sudah disinggung sebelumnya bahwa Kabupaten ini terletak persis di jantung Propinsi Papua, dengan Wamena sebagai ibukotanya. Motto kabupaten ini adalah “Yogotak Hubuluk Motok Hanorogo”, yang artinya “Hari esok harus lebih baik dari hari ini.” Motto ini menjadi tekad dari pemerintah dan seluruh masyarakat Jayawijaya, sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Banyak pendapat mengenai kota Wamena. Sebelum Kabupaten Jayawijaya didiami oleh masyarakat Baliem dan suku lainnya, pada mulanya merupakan sebuah danau yang disebut danau Wio. Diperkirakan ± tahun 1813 terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga terjadi perubahan alam dan terbentuklah dataran kering/lembab, kemudian bermunculan suku pribumi yang datang dari Selatan dan Timur yang berkembang menjadi Penduduk asli

Jayawijaya yang sekarang disebut dengan Suku Baliem. Sedikit tentang Asal-usul nama "Wamena" Ada beberapa pendapat mengenai asal-usul nama "Wamena" sebagai namakota di Lembah Baliem, namun tidak dapat dipastikan mana yang benar. Ada yang berpendapat bahwa Wamena berasal dari bahasa Dani yang terdiri dari dua kata, yakni Wa dan Mena, yang berarti babi jinak. Itu sebabnya, cinderamata khas kota ini adalah foto atau gambar seorang wanita yang lagi menyusui seekor babi. Namun, tidak semua orang setuju dengan pendapat seperti ini. Sulitnya menentukan asal-usul nama "Wamena" adalah karena minimnya sumber data yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan apakah kata "Wamena" diambil dari salah satu nama tempat di Lembah Baliem ini atau dari salah satu bahasa perantara di kalangan masyarakat yang mendiami lembah ini. Itu sebabnya, nama "Wamena" kemudian ditelusuri dari beberapa informasi yang sempat ditulis para misionaris yang pernah melakukan ekspedisi di daerah pegunungan Tengah dengan menyampaikan data tertulis serta informasi lisan yang Kabupaten Jayawijaya didapatkan dalam sarasehan dalam rangka hari jadi kota Wamena tanggal 4 November 1996. Berikut petikan informasi tersebut. "Pada tahun 1959 pemerintah Belanda memasuki Lembah Baliem melalui lapangan terbang di Hitigimadan membuka pusatnya di Wesaput (muara kali Wesak = Wesagaput = Wesaput) dengan kepala pemerintahan Belanda yang pertama (kontrolir) bernama Tn. Velkamp tugas pertamanya adalah membangun lapangan terbang dekat kali Uwe (Uweima). Berdasarkan hal ini kemudian timbul pendapat yang mengatakan bahwa kata "Wamena" berasal dari kata "Uweima" (dari nama kali Uwe artinya di pinggir kali Uwe), yang kemudian oleh para

pendatang diucapkan secara salah menjadi Wamena. Pendapat ini juga belum tentu benar karena dalam peta yang dibuat oleh ekspedisi Archbol (1938) kali Uwe juga disebut Wamena. Sementara dalam versi yang lain nama "Wamena" oleh A. Akua menjelaskan dalam bukunya bahwa orang wio, nama yang umum digunakan untuk daerah lembah Baliem itu sendiri tidak mengenal suatu tempat dengan nama Wamena. Nama itu diberikan pada tahun 1957 – 1958 oleh Pendeta Jerry Rose yang tinggal dekat lapangan terbang sebagai pengurus barang milik CAMA. Pada suatu hari ia melihat mama kandung Kain Wenhule Hubi, Toarekhe Itlay menetekkan anak babinya sambil berkata "yi wam ena oo.." (ini babi piara); oleh karena itu, ia menyebut tempat itu "Wamena ". Namun dalam catatan arsip gereja Katholik, pihak CAMA (Pendeta Rose) mulai berdomisili di Wamena pada bulan september 1960 dan tidak pada tahun 1957 – 1958, kemudian benarkah bahwa ibu-ibu Baliem menyusui anak babi kesayangan mereka seperti seorang bayi? Tentulah hal ini tidak benar. Cerita ini memberikan gambaran yang keliru kepada orang-orang luar mengenai orang Baliem. Ada pula yang mengatakan asal mula kata Wamena (Ibukota Jayawijaya) dari kata WAM – ENA diterjemahkan secara harfiah dalam bahasa Dani, yang berarti sedang memelihara babi. Dalam berbagai sumber disebutkan bahwa nama Wamena tercipta dari sebuah salah pengertian. Ketika rombongan misionaris Amerika datang ke Lembah Baliem pada tahun 1954 bertemu dengan sejumlah penduduk yang tengah memelihara babi. Pendatang baru itu menanyakan nama daerah yang baru diinjak itu tetapi penduduk setempat menjawab dalam bahasa setempat mereka setengah memelihara babi. Mulai dari saat itu daerah tersebut menyandang

nama Wamena. Nama asli Wamena sebenarnya adalah “Amoa” yang berarti tempat bertemu orang banyak. Dari beberapa sumber informasi tersebut dapat disimpulkan bahwa kata wamena telah ada sejak dan digunakan hingga saat ini dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat di Lembah Baliem, yang kemudian diabadikan menjadi sebagai ibu kota kabupaten Jayawijaya.

3) Pemerintah Daerah

Bahwa prinsip dan usaha Pemerintah Kabupaten Jayawijaya adalah berdasarkan arahan otonomi daerah dan otonomi khusus Provinsi Papua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 dan nomor 21 tahun 2001, sebagai format kepemimpinan Daerah Kabupaten Jayawijaya. Arahan utama otonomi khusus (otsus) di Provinsi Papua tahun 2001 adalah bahwa masyarakat asli Papua yang 80 % berdomisili di Pegunungan dan Lembah harus mendapat tempat khusus dalam pembangunan yakni “terwujudnya masyarakat Jayawijaya yang berkualitas, berbudaya, dan mandiri.” Sebagai suatu sistem, Pemerintahan Kabupaten Jayawijaya memiliki hubungan struktural dengan Provinsi Papua, artinya Pemerintah Jayawijaya patut memberikan peluang secara terbuka kepada pemerintah Provinsi pada hal-hal tertentu, bahkan dalam menentukan arah kebijakan pun senantiasa mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Provinsi, sehingga sering terjadi pembiasan dari kebijakan pembangunan Kabupaten Jayawijaya yang akan dicapai dan tertata dalam semua tataran struktur birokrasi Pemerintahan Kabupaten. Struktur program pemerintahan yang cenderung terformat berdasarkan aturan Provinsi dan Pusat, belum adaptif dengan tantangan riil dan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat. Semangat otonomi bagi provinsi Papua, memberikan kemungkinan bagi Kabupaten Jayawijaya untuk dimekarkan menjadi 4 (empat) wilayah pemekaran baru dan otonom. Namun sebagai kabupaten induk, Kabupaten Jayawijaya masih dan wajib memberikan porsi penganggaran selama kurun waktu tertentu, sehingga praktis mengurangi alokasi bagi Kabupaten Induk Jayawijaya. Menyasati aturan dan tata pemerintahan yang bersih adalah suatu keharusan bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, sehingga konsentarsi

penuh diarahkan kepada fungsi struktural. Sementara itu dinamika hubungan Dinas, Badan, Kantor distrik menampilkan kurang sinergisnya sejumlah program, akibatnya kesenimbangan dan saling menopang menjadi menurun. Pengembangan program kebijakan sektoral cenderung tersentralisasi dan terpola, sehingga dominasi pro-program cukup terasa pada instansi tertentu, sehingga diharapkan adanya kemampuan Pemerintah untuk menata dan mensinergikan program antarinstansi teknis secara optimal, proporsional dan melayani untuk dinikmati masyarakat secara menyeluruh.

4) Perangkat Daerah

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 6, 7, 8 dan 9 Tahun 2008. Perangkat Daerah tersebut mengatur tentang penyelenggara pemerintahan di daerah yang disebut perangkat daerah. Penanggung jawab utama dalam perangkat daerah tersebut adalah Bupati yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kemudian, kedua pejabat eksekutif ini dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah (Sekda), dan oleh Asisten I dan Asisten II. Untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah, dalam Perda tersebut diatur juga tentang perangkat pendukung, yang terdiri dari Badan, Dinas, Kantor, dan Bagian. Selengkapnyanya adalah sebagai berikut Badan-badan, terdiri dari 7 (tujuh) Badan, yaitu:- Badan Kesatuan Bangsa,- Badan Perencanaan Daerah,- Badan Lingkungan Hidup,- Badan Kepegawaian Daerah,- Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung,- Badan Ketahanan Pangan dan Badan Inspektorat daerah, Dinas-dinas, terdiri dari 12 (dua belas) Dinas, yaitu:- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata,- Dinas Kesejahteraan Sosial dan Tenaga Kerja,- Dinas Kehutanan,- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,- Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan,- Dinas Pekerjaan Umum,- Dinas Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset,- Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, -- Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan- Dinas Tanaman Pangan dan Perkebunan, Kantor, terdiri dari 4 (empat) Kantor, yaitu:- Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB,- Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, -- Kantor Satuan Polisi dan Pamon Praja,- Kantor Rumah Sakit Umum Daerah, Bagian, terdiri dari 8 (delapan) Bagian, yaitu:- Bagian Tata Pemerintahan,- Bagian Pemerintahan Kampung, - Bagian Hukum dan Perundang-undangan,- Bagian Humas, Bagian Organisasi,- Bagian Umum,- Bagian Keuangan Tata Usaha Sekda,- Bagian Pengelolaan Data Elektronik,- Bagian di sekretariat Dewan. Selanjutnya seluruh kabupaten Jayawijaya dibagi atas 11 distrik (dulu kecamatan), yang setiap distriknya dibagi atas kampung (Desa) dan kelurahan. Distrik-distrik, terdiri dari 11 distrik (kecamatan),

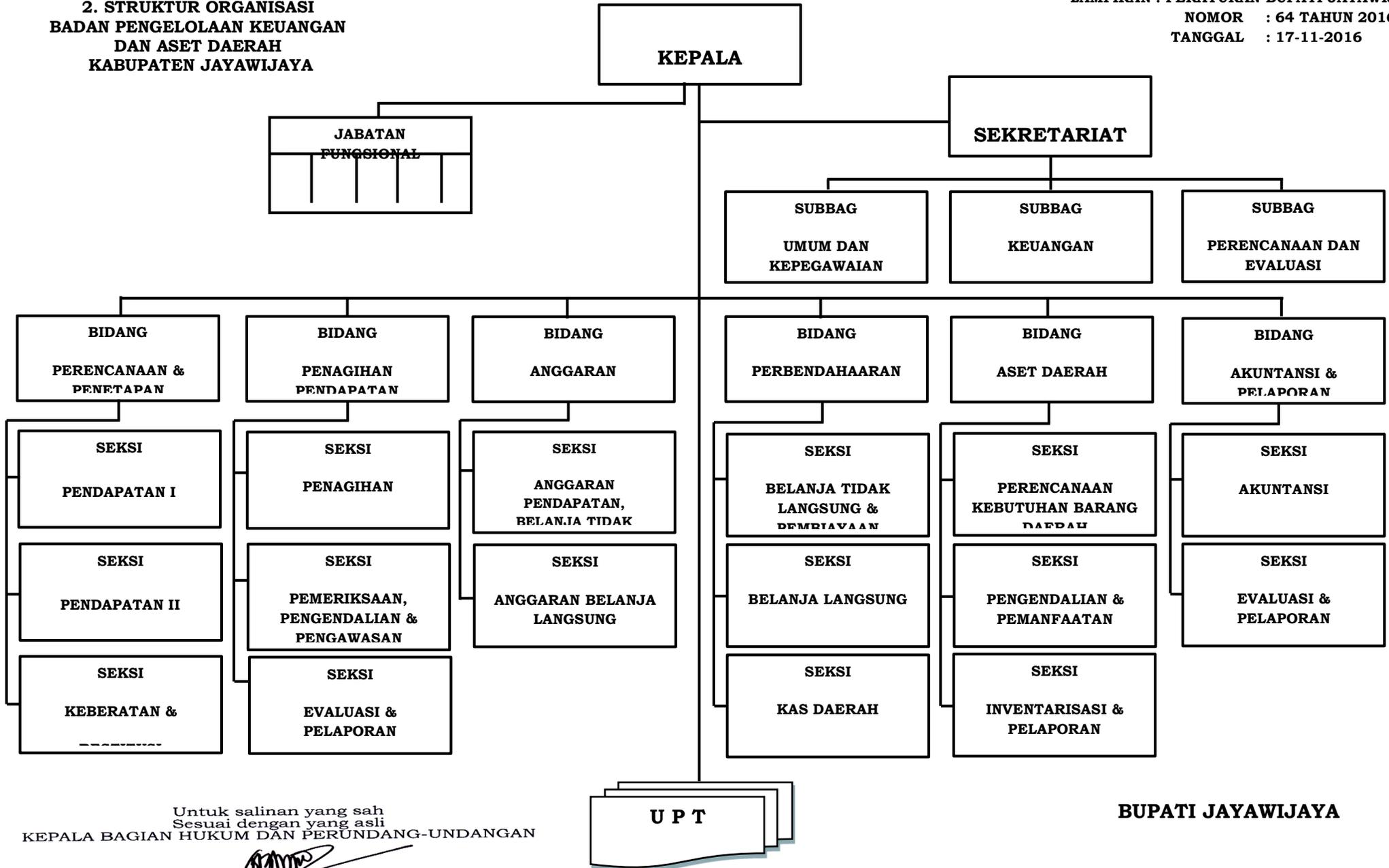
5) Wilayah Administratif

Setelah pemekaran kabupaten tahun 2008, Kabupaten Jayawijaya secara administratif memiliki 11 Distrik dengan luas Wilayah 8.496 Km² atau 2,68 persen dari luas Provinsi Papua, dengan jarak terjauh dalam jarak datar timur ke barat kurang lebih 104 Km dan jarak terdekat dalam jarak datar utara selatan kurang lebih 56 Km (Bappeda Kabupaten Jayawijaya 2009). Sampai dengan tahun 2010, sebelumnya adanya pemekaran distrik, Kabupaten Jayawijaya secara administratif terdiri dari 11 Distrik, 116 Kampung, 1 Kelurahan. (BPS Kabupaten Jayawijaya, 2010). Distrik-distrik yang terdapat di Kabupaten Jayawijaya adalah distrik Wamena, distrik Asolo Kobal, distrik Walelagama, distrik Hubikosi, Distrik Pelebagi, Distrik Asologaima, Distrik Musatfak, Distrik Kurulu, Distrik Bolakme, Distrik Wollo, dan Distrik Yalengga. Dengan jumlah desa-desa yang tersebar sampai ke pelosok pedalaman kabupaten, sudah barang tentu ada risiko biaya tinggi terhadap pengadaan barang, jasa dan transportasi. Untuk lebih jelasnya, luas

wilayah masing-masing distrik serta jumlah kelurahan dan desa yang terdapat di Kabupaten Jayawijaya sebelum distrik-distrik tersebut dimekarkan.

**2. STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR : 64 TAHUN 2016
TANGGAL : 17-11-2016



Untuk salinan yang sah
 Sesuai dengan yang asli
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

[Signature]
 APRIDA

BUPATI JAYAWIJAYA

Cap/ttd

2. Tugas Pokok dan Fungsi

a) tugas pokok Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;;
2. Bupati ialah Bupati Jayawijaya;
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya yang selanjutnya disebut SEKDA;
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
7. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
9. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya;
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas organisasi perangkat daerah;

11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah pelaksana teknis pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Jayawijaya.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi bendaharawan umum daerah;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - c. Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pendapatan I
 2. Sub Bidang Pendapatan II
 3. Sub Bidang Keberatan dan Restitusi
 - d. Bidang Penagihan Pendapatan, membawahi :

1. Sub Bidang Penagihan
 2. Sub Bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan
 3. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- e. Bidang Anggaran, membawahi :
1. Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak langsung Pembiayaan Daerah
 2. Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- f. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
1. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 2. Sub Bidang Belanja Langsung
 3. Sub Bidang Kas Daerah
- g. Bidang Aset Daerah, membawahi :
1. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan
 3. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan
- h. Bidang Akutansi dan Pelaporan, membawahi :
1. Sub Bidang Akuntansi
 2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional
- j. UPTD
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Bidang Tugas Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan badan dalam melaksanakan fungsi penunjang

urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas badan pengelolaan keuangan dan aset daerah di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan dan perencanaan.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
 - b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
 - d. melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
 - e. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;

g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
 - d. Menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Rencana kerja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP dan LPPD Badan;
 - e. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerjasama;
 - f. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
 - g. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset;

- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3

Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang perencanaan dan penetapan pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendapatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keberatan dan restitusi;
- c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Pendapatan I mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Perencanaan dan Penetapan Pajak dalam bidang pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan objek pajak hotel,

restoran, hiburan, reklame, air tanah dan pajak mineral bukan logam dan batuan, dan objek retribusi daerah.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pendapatan II mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan dalam bidang pendataan, pendaftaran, penetapan dan penerbitan objek pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan, Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Keberatan dan Restitusi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan dalam bidang registrasi, memeriksa, meneliti dan menghitung dokumen permohonan keberatan pajak dan restitusi.

Paragraf 4

Bidang Penagihan Pendapatan

Pasal 15

- (1) Bidang Penagihan Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Penagihan Pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penagihan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di

- bidang alian dan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pendapatan;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
- d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Penagihan Pendapatan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (4) Bidang Penagihan Pendapatan, membawahi :
- a. Sub Bidang Penagihan
 - b. Sub Bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Penagihan Pendapatan dalam bidang penagihan pendapatan dan piutang daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Penagihan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penagihan;
 - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang penagihan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang penagihan;

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang

Penagihan Pendapatan dalam bidang pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan pendapatan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan;
 - b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pemeriksaan, pengendalian dan pengawasan secara berkala terhadap laporan Wajib Pajak;
 - e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas bidang Pemeriksaan, Pengendalian dan Pengawasan Pendapatan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
 - f. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Penagihan Pendapatan dalam bidang evaluasi dan pelaporan pendapatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Evaluasi dan Pelaporan;
- b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan, pembukuan dan penerimaan pendapatan daerah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan mengumpulkan bahan-bahan dan menyusun laporan pendapatan daerah semesteran dan tahunan;

Paragraf 5

Bidang Anggaran

Pasal 19

- (1) Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Anggaran.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran belanja langsung.
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Anggaran dalam bidang penyusunan anggaran pendapatan daerah, belanja tidak langsung, pembiayaan daerah dan perubahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi pendapatan daerah, belanja tidak langsung dan pembiayaan daerah;

Pasal 21

- (1) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Anggaran dalam bidang penyusunan anggaran belanja langsung dan perubahannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Anggaran Belanja Langsung;

- b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang Anggaran Belanja Langsung;
- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Anggaran Belanja Langsung;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan mengolah anggaran belanja langsung dan menyempurnakan RKA-SKPD, DPA-SKPD, DPPA-SKPD menjadi APBD yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang asistensi penyusunan RKA bagi SKPD;
- f. mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang penyusunan rancangan Perda, Perbup APBD dan perubahannya beserta dokumen pendukung lainnya sampai dengan penetapan Perda dan Perbup APBD dan perubahan APBD

Paragraf 6

Bidang Perbendaharaan

Pasal 22

- (1) Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang Perbendaharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang belanja tidak langsung dan pembiayaan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang belanja langsung;

- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kas daerah.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Perbendaharaan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (4) Bidang Perbendaharaan, membawahi :
- a. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan
 - b. Sub Bidang Belanja Langsung
 - c. Sub Bidang Kas Daerah

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang perbendaharaan dalam bidang penyelenggaraan penatausahaan belanja tidak langsung dan pembiayaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - d. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang perbendaharaan dalam bidang penyelenggaraan penatausahaan belanja langsung.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Belanja Langsung mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Belanja Langsung;
 - b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang Belanja Langsung;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Belanja Langsung;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan dibidang Surat Penyediaan Dana (SPD) dan meneliti kelengkapan Surat Perintah Membayar (SPM) belanja langsung;

Pasal 25

- (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang perbendaharaan dalam bidang penyelenggaraan pengelolaan kas daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Kas Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Kas Daerah;
 - b. mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang Kas Daerah;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Kas Daerah;

- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pengelolaan dan penatausahaan kas umum daerah;
- e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan melaksanakan dan menatausahakan investasi kas daerah;

Paragraf 7

Bidang Aset Daerah

Pasal 26

- (1) Bidang Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan kebutuhan barang daerah;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengendalian dan pemanfaatan aset daerah;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pelaporan aset daerah.
 - d. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Aset Daerah secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (4) Bidang Aset Daerah, membawahi :
 - a. Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan
 - c. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan

Pasal 27

- (1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang aset daerah dalam bidang perencanaan kebutuhan dan pengadaan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan Barang Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang perencanaan kebutuhan barang daerah;
 - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang perencanaan kebutuhan barang daerah;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang perencanaan kebutuhan barang daerah;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) sebagai dasar pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah;

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Pengendalian Dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Aset Daerah dalam bidang pengendalian dan pemanfaatan aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengendalian dan pemanfaatan;
 - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pengendalian dan pemanfaatan;

- c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang pengendalian dan pemanfaatan;
- d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan bahan persetujuan Bupati tentang usul pemanfaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan serta barang milik daerah lainnya melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 29

- (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang aset daerah dalam bidang pengelolaan dan inventarisasi aset daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang inventarisasi dan pelaporan;
 - b. mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang inventarisasi dan pelaporan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang inventarisasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan panatusahaan dan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan pemerintah daerah;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) menurut penggolongan dan kodifikasi barang ;
 - f. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pencatatan barang milik daerah yang dimuat dalam Kartu Inventaris Barang Barang A, B, C, D, E dan F serta rekapitulasi atas pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah dalam Daftar

Barang Milik Daerah (DBMD) dan dokumentasi kepemilikan aset berupa kendaraan, tanah dan bangunan;

Paragraf 8

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 30

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di bidang akuntansi dan pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan.
- (4) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 - a. Sub Bidang Akuntansi
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang akuntansi dan pelaporan dalam bidang akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang akuntansi;
 - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang akuntansi;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang akuntansi;

Pasal 32

- (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam bidang pembinaan pengelolaan keuangan SKPD dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang evaluasi dan pelaporan;
 - b. mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang evaluasi dan pelaporan;
 - c. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan Bidang evaluasi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan perumusan penyusunan kebijakan teknis penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - e. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian laporan hasil pelaksanaan kegiatan SKPD secara periodik laporan

triwulan, semesteran dan tahunan sebagai bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;

- f. mempersiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pengujian dan hasil verifikasi pertanggungjawaban keuangan fungsional SKPD setiap bulan;
- g. menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian laporan realisasi semester pertama dan prognosis 6 (enam) bulan

Paragraf 9

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 33

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di lapangan, maka di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis sesuai kebutuhan dan beban kerja atas usul Kepala Badan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Paragraf 10

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Uraian tugas kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
 - b. melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki.
 - c. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya.
 - d. mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
 - e. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut.
 - f. membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Badan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya.
 - g. melaksanakan tugas lian yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Paragraf 1

Umum

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan unit organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Paragraf 2

Pelaporan

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan satuan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh setiap pimpinan satuan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Kepala, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

- (4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Paragraf 3

Hal Mewakili

Pasal 37

Dalam hal Kepala berhalangan menjalankan tugasnya, Kepala dapat menunjuk Sekretaris dan dalam hal Sekretaris berhalangan pula, Kepala dapat menunjuk salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya dan atau sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 38

- (1) Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Bupati
- (2) kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam mempersiapkan bahan penentuan kebijakan Bupati di bidang kepegawaian
- (3) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur sesuai Pertauran perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 39

Pembiayaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan sumber yang sah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut

dengan Keputusan Bupati dan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku maka ketentuan yang mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan peraturan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena

Pada tanggal :17-11-2016

BUPATI JAYAWIJAYA

Cap/ttd

WEMPI WETIPO

b. Keadaan Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi | Persentase |
|---------------|---------------|-----------------|------------|
| 1 | Laki-laki | 14 Orang | 77,7 |
| 2 | Perempuan | 4 Orang | 22,2 |
| Jumlah | | 18 Orang | 100 |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar pegawai badan pengelolaan keuangan dan asset daerah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah 14 atau 77,7 % dan perempuan 4 orang atau 22,2%.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan pangkat golongan

Berdasarkan pangkat golongan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Keadaan Responden Berdasarkan pangkat golongan

| No | Umur | Frekuensi | Persentase |
|----|---------------|-----------|------------|
| 1 | Pembina | 1 | 5,5 |
| 2 | Penata | 2 | 11,1 |
| 3 | Pengatur muda | 8 | 44,4 |

| | | | |
|---------------|--------------------|-----------|------------|
| 4 | Pengatur muda TK.1 | 3 | 16,6 |
| 5 | Honorer | 4 | 22,2 |
| Jumlah | | 18 | 100 |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Pembina sebanyak 1 orang, penata sebanyak 2 orang, pengatur muda sebanyak 8 orang, pengatur muda TK.1 sebanyak 3 orang, honorer sebanyak 4 orang

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

| No | Pendidikan | Frekuensi | Persentase |
|---------------|------------|-----------------|------------|
| 1 | S2 | 2 | 11,1 |
| 2 | S1 | 2 | 11,1 |
| 3 | D3 | 1 | 5,5 |
| 4 | SMA | 13 | 72,2 |
| Jumlah | | 18 Orang | 100 |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa S2 sebanyak 2 orang, S1 sebanyak 2 orang, D3 sebanyak 1 orang dan SMA sebanyak 13 orang.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Agama

Berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Keadaan Responden berdasarkan agama

| No | Agama | Frekuensi | Persentase |
|--------|---------|-----------|------------|
| 1 | Islam | 1 | 5,5 |
| 2 | Kristen | 17 | 94,4 |
| 3 | Hindu | 0 | 0 |
| 4 | Budha | 0 | 0 |
| Jumlah | | 18 | 100 |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa agama Islam 1 orang atau 5,5%, kristen berjumlah 17 atau 94,4%. Hindu 0 atau 0%, Budha 0 atau 0%.

c. Analisa Data

Instrumen masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah terstandar sehingga dapat dikatakan valid dan reliabel. Apabila hasil uji validitas (*keadaan yang menggambarkan tingkat instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur*) dan uji reliabilitas (*membelah seluruh instrumen menjadi dua yang sama besar*) atas alat ukur tersebut adalah positif dan mendekati nilai 1 (*satu*). Untuk memenuhi maksud tersebut, maka sebelum data diolah dan dianalisis, terlebih dahulu dilakukan pengujian data dengan menggunakan teknik pengujian validitas (*test of validity*) dan pengujian reliabilitas (*test of reliability*).

Dalam penelitian ini ada dua variabel yang diuji yaitu data variabel indenpenden/bebas dan variabel dependent/terikat dimana variabel bebas yaitu sumber daya alam dengan indikator yang meliputi: Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Kehutanan, Sumber Daya

Pariwisata .variabel terikat yaitu pendapatan asli daerah dengan indikator yang diteliti meliputi : pembangunan daerah, kesejahteraan masyarakat untuk merekomendasi pendaatan asli daerah kabupaten jayawijaya.

a. Uji Validitas Instrumen

1. Variabel Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil uji validitas variabel sumber daya alam terhadap butir-butir pernyataan yang diajukan pada 11 responden, Hasil Perhitungan Uji Validitas menggunakan SPSS Variabel sumber daya lahan (Lampiran 7), maka dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut di bawah ini:

Tabel 4.5

Uji Validitas Variabel Sumber Daya Alam

| Butir Soal Instrument | r hitung | r kritis | Keterangan |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 0,69 | 0,30 | Valid |
| 2 | 0,71 | 0,30 | Valid |
| 3 | 0,77 | 0,30 | Valid |
| 4 | 0,40 | 0,30 | Valid |
| 5 | 0,89 | 0,30 | Valid |
| 6 | 0,61 | 0,30 | Valid |
| 7 | 0,51 | 0,30 | Valid |
| 8 | 0,65 | 0,30 | Valid |

| | | | |
|----|------|------|-------|
| 9 | 0,57 | 0,30 | Valid |
| 10 | 0,92 | 0,30 | Valid |
| 11 | 0,44 | 0,30 | Valid |

Sumber Data : *Hasil Pengolahan Data Primer (SPSS), 2020*

Dari tabel 4.5 di atas, terlihat bahwa seluruh butir-butir pertanyaan pada variabel sumber daya alam memiliki data yang valid, dikarenakan nilai r hitung lebih besar dari r kritis yaitu sebesar 0,30. Butir yang memiliki validitas tertinggi adalah butir pernyataan nomor 10 dengan koefisien korelasi 0,92 dan yang paling rendah adalah butir pernyataan nomor 4 dengan koefisien korelasi 0,40 sehingga semua butir pernyataan pada instrumen Variabel sumber daya alam dapat digunakan sebagai dasar analisa lebih lanjut.

2. Variabel pendapatan asli daerah

Berdasarkan hasil uji validitas variabel pendapatan asli daerah terhadap butir-butir pernyataan yang diajukan pada 11 responden, maka dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut di bawah ini:

Tabel 4.6

Uji Validitas Variabel Pendapatan Asli Daerah

| Butir Soal Instrument | r hitung | r kritis | Keterangan |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 0,56 | 0,30 | Valid |
| 2 | 0,41 | 0,30 | Valid |
| 3 | 0,40 | 0,30 | Valid |

| | | | |
|----|------|------|-------|
| 4 | 0,44 | 0,30 | Valid |
| 5 | 0,37 | 0,30 | Valid |
| 6 | 0,51 | 0,30 | Valid |
| 7 | 0,45 | 0,30 | Valid |
| 8 | 0,41 | 0,30 | Valid |
| 9 | 0,36 | 0,30 | Valid |
| 10 | 0,38 | 0,30 | Valid |
| 11 | 0,47 | 0,30 | Valid |

Sumber Data : *Hasil Pengolahan Data Primer (SPSS), 2020*

Dari tabel 4.6 di atas, terlihat bahwa tidak seluruh butir-butir pertanyaan pada variabel pendapatan asli daerah memiliki data yang valid. Sehingga semua butir-butir pertanyaan pada variabel pendapatan asli daerah dapat digunakan sebagai dasar analisa lebih lanjut.

b. Uji Reliabilitas Instrumen

Reliabilitas dimaksudkan untuk mengetahui keandalan instrumen penelitian. Untuk menguji reliabilitas instrumen variabel X dan Y pada penelitian ini adalah menggunakan metode *Cronbach Alpha* (α) yakni dengan menghitung rata-rata interkorelasi di antara butir pertanyaan dalam kuesioner. Pengukuran dikatakan reliabel (andal) adalah bila alat pengukuran tersebut mampu memberikan pengukuran secara lengkap sesuai dengan apa yang telah diukurinya dan sejauh mana alat pengukur tersebut sama dengan dirinya sendiri.

Variabel dikatakan reliabel jika nilai alpha sama dengan atau lebih dari 0,60 dan dikatakan tidak reliabel jika alpha (α) kurang dari 0,60 (Usman dan Akbar, 2006:293).

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel Penelitian | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|------------------------|------------------|------------|
| Sumber Daya Alam | 0,948 | Reliabel |
| Pendapatan Asli Daerah | 0,882 | Reliabel |

Sumber Data : Hasil Pengolahan Data Primer (SPSS), 2020

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas variabel sumber daya alam adalah 0,948 dan variabel pendapatan asli daerah adalah 0,882 instrumen penelitian ini lebih besar dari > 0.60 pada tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, sehingga dapat dikatakan bahwa instrumen yang digunakan reliabel.

c. Teknik Analisa Data

1. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Sumber Daya Alam

Hasil analisis menunjukkan bahwa variable Sumber daya alam terbagi dalam tiga indikator yaitu sumber daya pertanian, sumber daya kehutanan dan sumber daya pariwisata.

1) Sumber daya pertanian

- a. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pertanian, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.8
**Jawaban responden terhadap pernyataan
Pemanfaatan SDA pertanian di kabupaten jayawijaya**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------|-----------|----------------|
| Sangat Baik | 2 | 18,1% |
| Baik | 6 | 54,4% |
| Cukup baik | 3 | 27,2% |
| Kurang baik | 0 | 0% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.8 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 6 orang atau 54,4% dengan jawaban baik.

- b. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pertanian dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.9
**Jawaban responden terhadapPemanfaatan SDA pertanian
tanaman pangan (Ubi jalar, Padi, Jagung dll) di kabupaten
jayawijaya**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 6 | 54,4% |
| Baik | 4 | 36,3% |
| Cukup baik | 1 | 9,09% |
| Kurang baik | 0 | 0% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.9 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 6 orang atau 54,4% dengan jawaban sangat baik.

- c. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pertanian dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.10

Jawaban responden terhadap pernyataan Pemanfaatan SDA Pertanian tanaman Holtikultura (Sayur-sayuran dan Buah-buahan) di kab. Jayawijaya

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 3 | 27,2% |
| Baik | 4 | 36,6% |
| Cukup baik | 2 | 18,8% |
| Kurang baik | 2 | 18,8% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.10 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 4 orang atau 36,3% dengan jawaban baik.

- d. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap

indikator Sumber daya pertanian dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 4.11

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Pemanfaatan SDA Pertanian Tanaman Perkebunan (Kopi)
di kab. Jayawijaya**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------|-----------|----------------|
| Sangat Baik | 5 | 45,4% |
| Baik | 3 | 27,7 % |
| Cukup baik | 3 | 27,2% |
| Kurang baik | 0 | 0% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.11 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4% dengan jawaban sangat baik.

2) Sumber daya kehutanan

- a. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya kehutanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12

**Jawaban responden terhadap pernyataan
pemanfaatan Sumber daya hutan di kabupaten
jayawijaya**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|------------------|-----------|----------------|
| Sangat Baik | 1 | 9.09% |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Baik | 2 | 18,18% |
| Cukup baik | 7 | 63,6% |
| Kurang baik | 1 | 9,09% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.12 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 7 orang atau 63,6% dengan jawaban cukup baik.

- b. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya kehutanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.13

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Pecegahan penebangan liar di hutan**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 1 | 9,09% |
| Cukup baik | 2 | 18,1% |
| Kurang baik | 6 | 54,5% |
| Sangat tidak baik | 2 | 18,1% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.13 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 6 orang atau 54,5% dengan jawaban kurang baik.

- c. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya kehutanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Kebijakan pelestarian sumber daya hutan**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 2 | 18,1% |
| Cukup baik | 3 | 27,2% |
| Kurang baik | 5 | 45,4% |
| Sangat tidak baik | 1 | 9,09% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.14 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4 % dengan jawaban kurang baik.

- d. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya kehutanan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.15

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Menangani kendala yang mengganggu kelestarian areal
hutan**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 1 | 9,09% |
| Baik | 0 | 0% |
| Cukup baik | 4 | 36,3 % |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Kurang baik | 4 | 36,3 % |
| Sangat tidak baik | 2 | 18,1% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.15 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 4 orang atau 36,3% dengan jawaban cukup baik. paling banyak 4 orang atau 36,3% dengan jawaban kurang baik.

3) Sumber daya pariwisata

- a. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pariwisata, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.16

Jawaban responden terhadap pernyataan Pengelolaan Sumber daya pariwisata di kabupaten jayawijaya

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------|-----------|----------------|
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 2 | 18,1% |
| Cukup baik | 5 | 45,4% |
| Kurang baik | 4 | 36,3% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.16 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4% dengan jawaban cukup baik.

- b. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pariwisata, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.17

| Jawaban responden terhadap pernyataan Pendapatan dari hasil pariwisata | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 1 | 9,09% |
| Cukup baik | 7 | 63,6% |
| Kurang baik | 1 | 9,09% |
| Sangat tidak baik | 2 | 18,1% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.17 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 7 orang atau 63,6% dengan jawaban cukup baik.

- c. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator sumber daya pariwisata, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.18

| Jawaban responden terhadap pernyataan Kalkulasi pendapatan daerah lama sektor pariwisata | | |
|---|------------------|-----------------------|
| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 1 | 9,09% |
| Cukup baik | 5 | 45,4% |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Kurang baik | 3 | 27,2% |
| Sangat tidak baik | 2 | 18,1% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.18 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4% dengan jawaban cukup baik.

Tabel 4.19

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Potensi sumberdaya yang dimiliki dikabupaten
jayawijaya**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 6 | 54,5% |
| Baik | 3 | 27,2% |
| Cukup baik | 2 | 18,1% |
| Kurang baik | 0 | 0% |
| Sangat tidak baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.19 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 6 orang atau 54,5% dengan jawaban sangat baik.

b. Pendapatan Asli Daerah

Hasil analisis menunjukkan bahwa variable Sumber daya alam terbagi dalam dua indikator yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

1) Pembangunan daerah

- a. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.20

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Pemerintah mendorong wacana sumberdaya sebagai
modal pembangunan**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 2 | 18,1% |
| Cukup Baik | 7 | 63,6% |
| Tidak Baik | 2 | 18,1% |
| Sangat Tidak Baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.20 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 7 orang atau 63,6% dengan jawaban cukup baik.

- b. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21

**Jawaban responden terhadap pernyataan
Kemampuan dalam mengelola sumberdaya yang
dumiliki**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 0 | % |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Baik | 3 | 27,2% |
| Cukup Baik | 4 | 36,6% |
| Tidak Baik | 3 | 12% |
| Sangat Tidak Baik | 1 | 9,09% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2019

Dari tabel 4.21 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 4 orang atau 36,6% dengan jawaban cukup baik.

- c. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.22

Jawaban responden terhadap pernyataan Kewenangan pemerintah dalam tugas pembangunan

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 2 | 18,1% |
| Baik | 3 | 27,2% |
| Cukup Setuju | 3 | 27,2% |
| Tidak Setuju | 3 | 27,2% |
| Sangat Tidak Setuju | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.22 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 3 orang atau 27,2% dengan jawaban baik.

- d. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator pembangunan daerah, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
**Jawaban responden terhadap pernyataan
Pembangunan secara merata**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 1 | 9,09% |
| Baik | 2 | 18,1% |
| Cukup Setuju | 1 | 9,09% |
| Tidak Setuju | 2 | 18,1% |
| Sangat Tidak Setuju | 5 | 45,4% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.24 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4% dengan jawaban sangat tidak baik.

2) Kesejahteraan masyarakat

- a. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.25
**Jawaban responden terhadap pernyataan Mamfaat
dari sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan
masyarakat**

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
|-------------------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Sangat Baik | 0 | 0% |
| Baik | 4 | 36,6% |
| Cukup Baik | 5 | 45,4% |
| Tidak Baik | 2 | 18,1% |
| Sangat Tidak Baik | 0 | 0% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.20 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45,4 % dengan jawaban cukup Baik.

- b. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.26

Jawaban responden terhadap pernyataan Tingkat kesejahteraan masyarakat

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 0 | 8% |
| Baik | 1 | 9,09% |
| Cukup Baik | 4 | 36,3% |
| Tidak Baik | 5 | 45% |
| Sangat Tidak Baik | 1 | 9,09% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.26 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 5 orang atau 45% dengan jawaban tidak Baik.

- c. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27

Jawaban responden terhadap pernyataan Keuntungan dari pengelolaan sumberdaya dapat dirasakan oleh masyarakat

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 1 | 9,09% |
| Baik | 0 | 0% |
| Cukup Baik | 4 | 36,3% |
| Tidak Baik | 4 | 36,3% |
| Sangat Tidak Baik | 2 | 18,1% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.27 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 4 orang atau 36,3% dengan jawaban cukup baik.

- d. Untuk mengetahui frekuensi jawaban responden terhadap indikator kesejahteraan masyarakat, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.28

Jawaban responden terhadap pernyataan Perekonomian masyarakat semakin meningkat

| Kategori Jawaban | Frekuensi | Persentase (%) |
|-------------------------|------------------|-----------------------|
| Sangat Baik | 1 | 9,09% |
| Baik | 1 | 9,09% |
| Cukup Baik | 6 | 54,5% |
| Tidak Baik | 2 | 18,1% |

| | | |
|-------------------|-----------|-------------|
| Sangat Tidak Baik | 1 | 9,09% |
| Jumlah | 11 | 100% |

Sumber Data : Pengolahan data Primer, 2020

Dari tabel 4.28 diatas dilihat bahwa jumlah responden sebanyak 11 orang, dan yang menjawab paling banyak 6 orang atau 54,4% dengan jawaban cukup baik.

c. Uji Regresi

Uji regresi linear menggunakan program SPSS *for windows* versi 22 menghasilkan parameter statistik yang di sajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.26
Hasil Regresi Pengolahan SPSS

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 23.326 | 4.508 | | 5.175 | .000 |
| Sumber daya alam | .427 | .120 | .566 | 3.568 | .001 |

a. Dependent Variable: Pendapatan asli daerah

Hasil pada tabel 5.30 tersebut, terlihat bahwa persamaan analisis regresi linier sederhana antara pengaruh sumber daya alam (X), terhadap pendapatan asli daerah (Y) kabupaten jayawijaya adalah: $Y = 23.326 + 0,427x$

Tingkat signifikansi variabel sumber daya alam menunjukkan $t_{hitung} (3.568) > t_{tabel} (0,9527), 1,703$ dengan $Sig. (0,000) < \alpha (0,05)$, sehingga H_0 ditolak, artinya koefisien regresi signifikan atau sumber daya alam benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa

korelasi antara sumber daya alam dengan pendapatan asli daerah sebesar 0,566 adalah signifikan. Sehingga dapat digeneralisasikan untuk populasi dimana sampel diambil, atau hubungan yang terjadi antara kedua variabel dapat diberlakukan kepada seluruh populasi.

Tabel 4.27
Tingkat Hubungan Antara Sumber Daya Alam Dengan
Pendapatan Asli Daerah

| Model Summary | | | | |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 | .566 ^a | .320 | .295 | 7.34025 |

- a. Predictors: (Constant), sumber daya alam
- b. Dependent variabel Pendapatan asli daerah

Tabel 5.31 tersebut menunjukkan bahwa kolom R adalah koefisien korelasi Pearson = 0,566 atau Sig. (0,000) < α (0,05) yang menunjukkan tingkat hubungan yang sedang antara variabel sumber daya alam terhadap variabel pendapatan asli daerah. Koefisien determinasi (R Square) menunjukkan bahwa 32% variabel sumber daya alam memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah.

d. Uji Korelasi

Uji korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel Sumber daya alam dengan variabel Pendapatan asli daerah pada kantor PCP Wamena maka dapat digunakan aplikasi spss versi 22 dengan rumus *pearson product moment*. Adapun hasil perhitungan analisisnya dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 5.28
Hasil Uji Kolerasi

| | | Sumber daya alam | Pendapatan asli daerah |
|------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| Sumber daya alam | Pearson Correlation | 1 | .566** |
| | Sig. (2-tailed) | | .001 |
| | N | 29 | 29 |
| Pendapatan asli daerah | Pearson Correlation | .566** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | |
| | N | 29 | 29 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

ari tabel 5.28 terlihat bahwa nilai koefisien korelasi antara sumber daya alam dengan pendapatan asli daerah adalah sebesar 0,566. Nilai ini termasuk dalam kategori sedang sesuai dengan interpretasi koefisien korelasi (Sugiyono, 2008:214) sebagai berikut :

Tabel 5.29
Interpretasi Koefisien Korelasi

| INTERVAL KOEFISIEN | TINGKAT HUBUNGAN |
|--------------------|------------------|
| 0,00 – 0,199 | Sangat Rendah |
| 0,20 – 0,399 | Rendah |
| 0,40 – 0,599 | Sedang |
| 0,60 – 0,799 | Kuat |
| 0,80 – 1,000 | Sangat Kuat |

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian dan analisa data variabel Sumber daya alam dengan Pendapatan asli daerah maka dikatakan bahwa pengaruh Sumber daya alam dengan Pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya adalah **sedang**. Hal ini diketahui dari hasil analisis korelasi *pearson product moment* dengan adanya pengaruh yang signifikan antara penilaian Sumber daya alam dengan Pendapatan asli daerah yang ditunjukkan dengan lebih besarnya koefisien korelasi yang diperoleh dibanding dengan harga r_{tabel} pada taraf signifikansi 5% $0,566 \geq 0,576$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara Sumber daya alam terhadap Pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya dikatakan sedang, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Setelah perhitungan korelasi dilakukan maka analisa dapat dilanjutkan dengan menghitung persamaan dengan regresi linier sederhana. Persamaan regresi digunakan untuk melakukan prediksi seberapa besar nilai variabel *dependent* bila nilai variabel *independent* dimanipulasi atau diubah-ubah.

Berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi linier sederhana yang diperoleh adalah $Y = 23.326 + 0,427x$ Persamaan regresi yang telah ditemukan tersebut dapat digunakan untuk melakukan prediksi atau ramalan berapa nilai dalam variabel Pendapatan asli daerah akan terjadi, bila nilai dalam variabel sumber daya alam ditetapkan. Jadi diperkirakan nilai Sumber daya alam dinaikkan sampai optimal 29,4 %, maka pendapatan asli daerah akan meningkat menjadi 70,6%. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin baik sumber daya alam, maka semakin meningkat pula Pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya.

Dari hasil signifikansinya antara sumber daya alam terhadap pendapatan asli daerah, diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 3.568 selanjutnya

nilai tersebut dibandingkan dengan harga t_{tabel} untuk taraf signifikan 95%

atau alpha 5% uji dua pihak dan $dk = 11 - 2 = 9$, maka diperoleh nilai t_{tabel} 1,703. Oleh karena itu, $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,041 < 1,714$) dengan nilai sig $0,069 > 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini “Ada pengaruh antara sumber daya alam terhadap pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya tetapi tidak signifikan”.

Kemudian dari hasil perhitungan koefisien determinasi atau koefisien penentu diperoleh nilai kontribusi yang diberikan oleh sumber daya alam dengan pendapatan asli daerah sebesar 28,4%. Hal itu berarti bahwa selebihnya yaitu 69,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar cakupan penelitian yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ada pengaruh yang signifikan antara sumber daya alam terhadap pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
2. Ada hubungan yang sedang antara sumber daya alam dan pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya. Hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan koefisien korelasi dimana diperoleh nilai sebesar 0,566.
3. Kontribusi yang diberikan oleh sumber daya alam dan pendapatan asli daerah kabupaten jayawijaya. dari perhitungan tersebut diperoleh nilai kontribusi 28,4 % yang artinya 69,6% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Dari kesimpulan yang diperoleh hasil penelitian dan pembahasan, maka peneliti memberikan masukan, yaitu:

1. Hendaknya dilakukan kajian terhadap berbagai faktor lain yang mempengaruhi pendapatan asli daerah, mengingat faktor sumber daya alam hanya berkontribusi sebesar 29,4%.

DAFTAR TABEL

| <i>Nomor</i> | <i>Teks</i> | <i>Halaman</i> |
|--------------|--|----------------|
| Tabel 4.1 | Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin..... | 84 |
| Tabel 4.2 | Keadaan responden berdasarkan Pangkat golongan.... | 84 |
| Tabel 4.3 | Keadaan responden tingkat pendidikan..... | 85 |
| Tabel 4.4 | Keadaan responden berdasarkan agama..... | 85 |
| Tabel 4.6 | Tanggapan responden Pemanfaatan SDA pertanian di kabupaten jayawijaya..... | 90 |
| Tabel 4.7 | Tanggapan responden Pemanfaatan SDA pertanian tanaman pangan (Ubi jalar, Padi, Jagung dll) di kabupaten jayawijaya..... | 91 |
| Tabel 4.8 | Tanggapan responden pemanfaatan SDA Pertanian tanaman Holtikultura (Sayur-sayuran dan Buah-buahan) di kab. Jayawijaya | 91 |
| Tabel 4.9 | Tanggapan responden pemanfaatan SDA Pertanian Tanaman Perkebunan (Kopi) di kab. Jayawijaya..... | 92 |
| Tabel 4.10 | Tanggapan responden pemanfaatan Sumber daya hutan di kabupaten jayawijaya..... | 92 |
| Tabel 4.11 | Tanggapan responden Pecegahan penebangan liar di hutan | 93 |
| Tabel 4.12 | Tanggapan responden Kebijakan pelestarian sumber daya hutan..... | 93 |
| Tabel 4.13 | Tanggapan responden Menangani kendala yang mengganggu kelestarian areal hutan | 94 |
| Tabel 4.14 | Tanggapan responden Pengelolaan Sumber daya pariwisata di kabupaten jayawijaya..... | 94 |
| Tabel 4.15 | Tanggapan responden Pendapatan dari hasil pariwisata..... | 95 |
| Tabel 4.16 | Tanggapan responden Kalkulasi pendapatan daerah lama sektor pariwisata..... | 95 |
| Tabel 4.17 | Tanggapan responden Potensi sumberdaya yang dimiliki di kabupaten jayawijaya..... | 96 |

Lampiran. 3

Uji Validitas Variabel Sumber Daya Alam

Correlations

| | | VAR000 01 | VAR00002 | VAR000 03 | VAR000 04 | VAR000 05 | VAR000 06 |
|--------------|-----------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| VAR0000 1 | Pearson | 1 | .819** | .677** | .485** | .723** | .895** |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .008 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 2 | Pearson | .819** | 1 | .661** | .533** | .794** | .775** |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .003 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 3 | Pearson | .677** | .661** | 1 | .426* | .781** | .643** |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .021 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 4 | Pearson | .485** | .533** | .426* | 1 | .433* | .511** |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .008 | .003 | .021 | | .019 | .005 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 5 | Pearson | .723** | .794** | .781** | .433* | 1 | .623** |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .019 | | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 6 | Pearson | .895** | .775** | .643** | .511** | .623** | 1 |
| | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .005 | .000 | |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VAR0000 7 | Pearson Correlation | .756** | .627** | .520** | .334 | .677** | .675** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .004 | .077 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 8 | Pearson Correlation | .398* | .407* | .553** | .520** | .641** | .293 |
| | Sig. (2-tailed) | .033 | .028 | .002 | .004 | .000 | .123 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 9 | Pearson Correlation | .793** | .631** | .730** | .476** | .608** | .884** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 0 | Pearson Correlation | .697** | .738** | .852** | .474** | .921** | .594** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 | .001 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 1 | Pearson Correlation | .704** | .606** | .491** | .822** | .475** | .686** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .007 | .000 | .009 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 2 | Pearson Correlation | .697** | .719** | .777** | .405* | .891** | .611** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .029 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

******. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*****. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)

Correlations

| | | VAR000 07 | VAR000 08 | VAR000 09 | VAR000 10 | VAR000 11 | VAR000 12 |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| VAR0000 1 | Pearson Correlation | .756** | .398* | .793** | .697** | .704** | .697** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .033 | .000 | .000 | .000 | .000 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .627** | .407* | .631** | .738** | .606** | .719** |
| 2 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .028 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .520** | .553** | .730** | .852** | .491** | .777** |
| 3 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .004 | .002 | .000 | .000 | .007 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .334 | .520** | .476** | .474** | .822** | .405* |
| 4 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .077 | .004 | .009 | .009 | .000 | .029 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .677** | .641** | .608** | .921** | .475** | .891** |
| 5 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .675** | .293 | .884** | .594** | .686** | .611** |
| 6 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .123 | .000 | .001 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | 1 | .226 | .602** | .602** | .532** | .516** |
| 7 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | | .239 | .001 | .001 | .003 | .004 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .226 | 1 | .357 | .619** | .547** | .659** |
| 8 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .239 | | .057 | .000 | .002 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0000 | Pearson | .602** | .357 | 1 | .684** | .582** | .579** |
| 9 | Correlation | | | | | | |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .057 | | .000 | .001 | .001 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 | Pearson | .602** | .619** | .684** | 1 | .475** | .920** |
| 0 | Correlation | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | Sig. (2-tailed) | .001 | .000 | .000 | | .009 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 1 | Pearson Correlation | .532** | .547** | .582** | .475** | 1 | .446* |
| | Sig. (2-tailed) | .003 | .002 | .001 | .009 | | .015 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR0001 2 | Pearson Correlation | .516** | .659** | .579** | .920** | .446* | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .004 | .000 | .001 | .000 | .015 | |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

******. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*****. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Hasil Uji Reliabilitas Sumber Daya Alam

Reliability

[DataSet0]

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|
| Cases | Valid | 11 | 100.0 |
| | Excluded^a | 0 | .0 |
| | Total | 11 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|-----------------------------|-------------------|
| .948 | 12 |

Uji Validitas Variabel Pendapatan Asli Daerah

Correlations

| | | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VAR00005 | VAR00006 |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| VAR00001 | Pearson Correlation | 1 | .272 | .197 | .419* | -.053 | .232 |
| | Sig. (2-tailed) | | .154 | .307 | .024 | .785 | .227 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00002 | Pearson Correlation | .272 | 1 | .689** | .728** | .369* | .416* |
| | Sig. (2-tailed) | .154 | | .000 | .000 | .049 | .025 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00003 | Pearson Correlation | .197 | .689** | 1 | .534** | .321 | .280 |
| | Sig. (2-tailed) | .307 | .000 | | .003 | .089 | .141 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00004 | Pearson Correlation | .419* | .728** | .534** | 1 | .210 | .377* |
| | Sig. (2-tailed) | .024 | .000 | .003 | | .274 | .044 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00005 | Pearson Correlation | -.053 | .369* | .321 | .210 | 1 | .764** |
| | Sig. (2-tailed) | .785 | .049 | .089 | .274 | | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| VAR00006 | Pearson Correlation | .232 | .416* | .280 | .377* | .764** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .227 | .025 | .141 | .044 | .000 | |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00007 | Pearson Correlation | .407* | .682** | .528** | .591** | .485** | .636** |
| | Sig. (2-tailed) | .028 | .000 | .003 | .001 | .008 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00008 | Pearson Correlation | .089 | .298 | .055 | .025 | .556** | .519** |
| | Sig. (2-tailed) | .646 | .116 | .776 | .899 | .002 | .004 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00009 | Pearson Correlation | .108 | .422* | .166 | .068 | .530** | .535** |
| | Sig. (2-tailed) | .576 | .022 | .390 | .725 | .003 | .003 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00010 | Pearson Correlation | .409* | .416* | .359 | .394* | .346 | .570** |
| | Sig. (2-tailed) | .027 | .025 | .056 | .035 | .066 | .001 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00011 | Pearson Correlation | .253 | .493** | .312 | .345 | .450* | .618** |
| | Sig. (2-tailed) | .186 | .007 | .099 | .067 | .014 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00012 | Pearson Correlation | .415* | .409* | .447* | .379* | .510** | .454* |
| | Sig. (2-tailed) | .025 | .028 | .015 | .043 | .005 | .013 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

| Correlations | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VAR00007 | VAR00008 | VAR00009 | VAR00010 | VAR00011 | VAR00012 |
| | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| kinerja aparatur | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .407* .028 29 | .089 .646 29 | .108 .576 29 | .409* .027 29 | .253 .186 29 | .415* .025 29 |
| VAR00002 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .682** .000 29 | .298 .116 29 | .422* .022 29 | .416* .025 29 | .493** .007 29 | .409* .028 29 |
| VAR00003 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .528** .003 29 | .055 .776 29 | .166 .390 29 | .359 .056 29 | .312 .099 29 | .447* .015 29 |
| VAR00004 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .591** .001 29 | .025 .899 29 | .068 .725 29 | .394* .035 29 | .345 .067 29 | .379* .043 29 |
| VAR00005 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .485** .008 29 | .556** .002 29 | .530** .003 29 | .346 .066 29 | .450* .014 29 | .510** .005 29 |
| VAR00006 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .636** .000 29 | .519** .004 29 | .535** .003 29 | .570** .001 29 | .618** .000 29 | .454* .013 29 |
| VAR00007 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | 1 .025 29 | .416* .025 29 | .399* .032 29 | .338 .073 29 | .318 .093 29 | .413* .026 29 |
| VAR00008 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N | .416* .025 29 | 1 .025 29 | .692** .000 29 | .313 .098 29 | .508** .005 29 | .368* .050 29 |
| VAR00009 | Pearson Correlation Sig. (2-tailed) | .399* .032 | .692** .000 | 1 .032 | .276 .147 | .407* .028 | .388* .037 |

| | | | | | | | |
|---|----------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00010 | Pearson Correlation | .338 | .313 | .276 | 1 | .800** | .477** |
| | Sig. (2-tailed) | .073 | .098 | .147 | | .000 | .009 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00011 | Pearson Correlation | .318 | .508** | .407* | .800** | 1 | .481** |
| | Sig. (2-tailed) | .093 | .005 | .028 | .000 | | .008 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| VAR00012 | Pearson Correlation | .413* | .368* | .388* | .477** | .481** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .026 | .050 | .037 | .009 | .008 | |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| *. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). | | | | | | | |
| ** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) | | | | | | | |

Hasil Uji Reliabilitas Pendapatan Asli Daerah Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

| | | N | % | |
|--------------|-----------------------------|-----------|--------------|--------------|
| Cases | Valid | 11 | 100.0 | 100.0 |
| | Excluded^a | 0 | .0 | .0 |
| | Total | 11 | 100.0 | 100.0 |

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

| Cronbach's Alpha | N of Items |
|-------------------------|-------------------|
| .882 | 12 |

Lampiran. 4
Hasil Uji Korelasi Sumber Daya Alam dan Pendapatan Asli

Correlations

| | | Kompetensi | KinerjaPegawai |
|----------------|---------------------|------------|----------------|
| Kompetensi | Pearson Correlation | 1 | .566** |
| | Sig. (2-tailed) | | .001 |
| | N | 11 | 11 |
| KinerjaPegawai | Pearson Correlation | .566** | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .001 | |
| | N | 29 | 29 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Lampiran. 6 Nilai Distribusi t

TABEL II
NILAI-NILAI DALAM DISTRIBUSI t

| α untuk uji dua pihak (two tail test) | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | 0,50 | 0,20 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,01 |
| α untuk uji satu pihak (one tail test) | | | | | | |
| dk | 0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,01 | 0,005 |
| 1 | 1,000 | 3,078 | 6,314 | 12,706 | 31,821 | 63,657 |
| 2 | 0,816 | 1,886 | 2,920 | 4,303 | 6,965 | 9,925 |
| 3 | 0,765 | 1,638 | 2,353 | 3,182 | 4,541 | 5,841 |
| 4 | 0,741 | 1,533 | 2,132 | 2,776 | 3,474 | 4,604 |
| 5 | 0,727 | 1,476 | 2,015 | 2,571 | 3,365 | 4,032 |
| 6 | 0,718 | 1,440 | 1,943 | 2,447 | 3,143 | 3,707 |
| 7 | 0,711 | 1,415 | 1,895 | 2,365 | 2,998 | 3,499 |
| 8 | 0,716 | 1,397 | 1,860 | 2,306 | 2,896 | 3,355 |
| 9 | 0,703 | 1,383 | 1,833 | 2,262 | 2,821 | 3,250 |
| 10 | 0,700 | 1,372 | 1,812 | 2,228 | 2,764 | 3,169 |
| 11 | 0,697 | 1,363 | 1,796 | 2,201 | 2,718 | 3,106 |
| 12 | 0,695 | 1,356 | 1,782 | 2,179 | 2,681 | 3,055 |
| 13 | 0,692 | 1,350 | 1,771 | 2,160 | 2,650 | 3,012 |
| 14 | 0,691 | 1,345 | 1,761 | 2,145 | 2,624 | 2,977 |
| 15 | 0,690 | 1,341 | 1,753 | 2,131 | 2,602 | 2,947 |
| 16 | 0,689 | 1,337 | 1,746 | 2,120 | 2,583 | 2,921 |
| 17 | 0,688 | 1,333 | 1,740 | 2,110 | 2,567 | 2,898 |
| 18 | 0,688 | 1,330 | 1,734 | 2,101 | 2,552 | 2,878 |
| 19 | 0,687 | 1,328 | 1,729 | 2,093 | 2,539 | 2,861 |
| 20 | 0,687 | 1,325 | 1,725 | 2,086 | 2,528 | 2,845 |
| 21 | 0,686 | 1,323 | 1,721 | 2,080 | 2,518 | 2,831 |
| 22 | 0,686 | 1,321 | 1,717 | 2,074 | 2,508 | 2,819 |
| 23 | 0,685 | 1,319 | 1,714 | 2,069 | 2,500 | 2,807 |
| 24 | 0,685 | 1,318 | 1,711 | 2,064 | 2,492 | 2,797 |
| 25 | 0,684 | 1,316 | 1,708 | 2,060 | 2,485 | 2,787 |
| 26 | 0,684 | 1,315 | 1,706 | 2,056 | 2,479 | 2,779 |
| 27 | 0,684 | 1,314 | 1,703 | 2,052 | 2,473 | 2,771 |
| 28 | 0,683 | 1,313 | 1,701 | 2,048 | 2,467 | 2,763 |
| 29 | 0,683 | 1,311 | 1,699 | 2,045 | 2,462 | 2,756 |
| 30 | 0,683 | 1,310 | 1,697 | 2,042 | 2,457 | 2,750 |
| 40 | 0,681 | 1,303 | 1,684 | 2,021 | 2,423 | 2,704 |
| 60 | 0,679 | 1,296 | 1,671 | 2,000 | 2,390 | 2,660 |
| 120 | 0,677 | 1,289 | 1,658 | 1,980 | 2,358 | 2,617 |
| ∞ | 0,674 | 1,282 | 1,645 | 1,960 | 2,326 | 2,576 |

Lampiran 5. Tabel Nilai r Product Moment

TABEL NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

| N | Taraf Signifikan | | N | Taraf Signifikan | | N | Taraf Signifikan | |
|----|------------------|-------|----|------------------|-------|------|------------------|-------|
| | 5% | 1% | | 5% | 1% | | 5% | 1% |
| 3 | 0,997 | 0,999 | 27 | 0,381 | 0,487 | 55 | 0,266 | 0,345 |
| 4 | 0,950 | 0,990 | 28 | 0,374 | 0,478 | 60 | 0,254 | 0,330 |
| 5 | 0,878 | 0,959 | 29 | 0,367 | 0,470 | 65 | 0,244 | 0,317 |
| 6 | 0,811 | 0,917 | 30 | 0,361 | 0,863 | 70 | 0,235 | 0,306 |
| 7 | 0,754 | 0,874 | 31 | 0,355 | 0,456 | 75 | 0,227 | 0,296 |
| 8 | 0,707 | 0,834 | 32 | 0,349 | 0,449 | 80 | 0,220 | 0,286 |
| 9 | 0,666 | 0,798 | 33 | 0,344 | 0,442 | 85 | 0,213 | 0,278 |
| 10 | 0,632 | 0,765 | 34 | 0,339 | 0,436 | 90 | 0,207 | 0,270 |
| 11 | 0,602 | 0,735 | 35 | 0,334 | 0,430 | 95 | 0,202 | 0,263 |
| 12 | 0,576 | 0,708 | 36 | 0,329 | 0,426 | 100 | 0,195 | 0,256 |
| 13 | 0,553 | 0,684 | 37 | 0,325 | 0,418 | 125 | 0,176 | 0,230 |
| 14 | 0,532 | 0,661 | 38 | 0,320 | 0,413 | 150 | 0,159 | 0,210 |
| 15 | 0,514 | 0,641 | 39 | 0,316 | 0,408 | 175 | 0,148 | 0,194 |
| 16 | 0,497 | 0,623 | 40 | 0,312 | 0,403 | 200 | 0,138 | 0,181 |
| 17 | 0,482 | 0,606 | 41 | 0,308 | 0,398 | 300 | 0,133 | 0,148 |
| 18 | 0,468 | 0,590 | 42 | 0,304 | 0,393 | 400 | 0,098 | 0,128 |
| 19 | 0,456 | 0,575 | 43 | 0,301 | 0,389 | 500 | 0,088 | 0,115 |
| 20 | 0,444 | 0,561 | 44 | 0,297 | 0,384 | 600 | 0,080 | 0,105 |
| 21 | 0,433 | 0,549 | 45 | 0,294 | 0,380 | 700 | 0,074 | 0,097 |
| 22 | 0,423 | 0,537 | 46 | 0,291 | 0,376 | 800 | 0,070 | 0,091 |
| 23 | 0,413 | 0,526 | 47 | 0,288 | 0,372 | 900 | 0,065 | 0,086 |
| 24 | 0,404 | 0,515 | 48 | 0,284 | 0,368 | 1000 | 0,062 | 0,081 |
| 25 | 0,396 | 0,505 | 49 | 0,281 | 0,364 | | | |
| 26 | 0,388 | 0,496 | 50 | 0,279 | 0,361 | | | |

mpiran. 3

Uji Validitas Variabel Kompetensi

Correlations

| | | VAR00001 | VAR00002 | VAR00003 | VAR00004 | VAR00005 |
|-------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
|)0001 | Pearson Correlation | 1 | .819** | .677** | .485** | .723** |
| | Sig. (2-tailed) | | .000 | .000 | .008 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0002 | Pearson Correlation | .819** | 1 | .661** | .533** | .794** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | | .000 | .003 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0003 | Pearson Correlation | .677** | .661** | 1 | .426* | .781** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | | .021 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0004 | Pearson Correlation | .485** | .533** | .426* | 1 | .433* |
| | Sig. (2-tailed) | .008 | .003 | .021 | | .019 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0005 | Pearson Correlation | .723** | .794** | .781** | .433* | 1 |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .019 | |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0006 | Pearson Correlation | .895** | .775** | .643** | .511** | .697** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .005 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0007 | Pearson Correlation | .756** | .627** | .520** | .334 | .627** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .004 | .077 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0008 | Pearson Correlation | .398* | .407* | .553** | .520** | .398* |
| | Sig. (2-tailed) | .033 | .028 | .002 | .004 | .033 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0009 | Pearson Correlation | .793** | .631** | .730** | .476** | .793** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0010 | Pearson Correlation | .697** | .738** | .852** | .474** | .697** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .009 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0011 | Pearson Correlation | .704** | .606** | .491** | .822** | .704** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .007 | .000 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
|)0012 | Pearson Correlation | .697** | .719** | .777** | .405* | .697** |
| | Sig. (2-tailed) | .000 | .000 | .000 | .029 | .000 |
| | N | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Gomes. E. Faustino, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Handoko, T. Hani, Dr, MBA, 2011, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFEE, Yogyakarta.
- Hasibuan, Melayu, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia (Dasar dan Kunci Keberhasilan)* PT Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu, Drs., 2011, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi, Cetakan Kelima Belas PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Lupiyoadi, Rambat dan Hamdani, 2006. *Manajemen Pemasaran Jasa*, Salemba Empat, Jakarta.
- Martono, Nanang, 2011, *Penelitian Kuantitatif. Analisis Isi dan analisis data sekunder*, edisi revisi ke-2, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Moekijat, Drs, 1990, *Kamus Manajemen*, Mandar Maju, Bandung.
- Mangkunegara, A., A., Anwar, Prabu, Drs., M.Si., P.Si., 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Cetakan Keenam, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Marwansyah, 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Alfa Beta, Bandung.
- Nazir, Moh. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.. Nasution, Mulia, 1994, *Manajemen Personalia Aplikasi Dalam Perusahaan*, Djambatan, Jakarta.
- , 2005, *Manajemen Mutu Terpadu*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Randall S. Schuler, dan Susan E. Jackson, 1997, *Manajemen Sumber Daya Manusia Menghadapi Abad ke-21*. Edisi Keenam Jilid I. Erlangga Jakarta.

BIODATA PENULIS :

Tesha Septian Lukito Rante, Dilahirkan di Wamena pada tanggal 20 September 1994, dari pasangan Bapak Daniel Rante, S.Sos, M.Si dan Ibu Etik Ernawati, anak ke dua dari dua bersaudara. Tamat SD YPK Betlehem Wamena pada tahun 2006, Tamat SMP Negeri 1 wamena pada tahun 2009, Tamat SMA Negeri 3 Jayapura pada tahun 2012. Pada tahun 2015 terdaftar sebagai Mahasiswa prodi Ilmu Pemerintahan (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Amal Ilmiah Yapis Wamena Tahun Akademik 2015/2016.